



Presiden Minta Sekolah Lima Hari Ditunda

Peraturan Menteri Pendidikan perihal lima hari sekolah dikaji ulang.

Mitra Tarigan
mitra.tarigan@tempo.co.id

JAKARTA — Presiden Joko Widodo menyatakan akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) sebagai dasar kebijakan sekolah lima hari. Hal itu disampaikan Jokowi—sapaan Joko Widodo—setelah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin di Istana Merdeka di Jakarta, kemarin. "Bapak Presiden meminta agar perpresnya dibuat sesegera mungkin," kata Muhadjir kepada *Tempo*, kemarin.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 ten-



tang Hari Sekolah diteken Muhadjir, Senin pekan lalu. Dalam aturan itu, penyelenggaraan pendidikan menjadi lima hari sepekan selama delapan jam per hari. Kementerian Agama dan organisasi kemasyarakatan khawatir aturan itu akan mengganggu lembaga pendidikan

keagamaan. Mereka risau aturan ini menggerus hak dasar anak, terutama siswa sekolah dasar, untuk berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Jauh sebelumnya, pada Agustus tahun lalu, Muhadjir pernah mengusulkan sekolah lima hari sepekan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam rapat kerja pembahasan penerapan "full day school", di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Muhadjir mengatakan tim Kementerian Pendidikan sebenarnya telah mengajukan permohonan agar rencana lima hari sekolah diatur dalam bentuk peraturan presiden. Kementerian telah mengajukannya pada 22 November tahun lalu. Namun Sekretariat Negara melalui surat yang terbit pada 16 Maret lalu menyatakan aturan lima hari sekolah cukup dituangkan dalam peraturan menteri. "Jadi, kalau harus diganti dengan perpres, artinya sesuai dengan inisiatif awal kami. Saya secara pribadi lebih sreg," katanya. Muhadjir menambahkan, perpres baru sekolah lima hari tak akan bertabrakan dengan jatah waktu mengajar guru. "Kami sedang menggodok pedomannya. Nanti kami sinkronkan," ucapnya.

Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan di Jakarta, kemarin, Ma'ruf Amin menyatakan perlunya penataan ulang terhadap aturan itu yang akan melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri. "Penataan juga melibatkan ormas Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas lain," katanya.

Ma'ruf Amin mengatakan aturan itu tak hanya menata lamanya pembelajaran, tapi juga meliputi seluruh aspek dengan menampung aspirasi masyarakat. Ia mengatakan peraturan se-

kolah lima hari itu terbit dengan dilatarbelakangi untuk menguatkan karakter pelajar, di antaranya menangkal perkembangan paham radikal. "Mungkin judul pada perpres bukan lima hari sekolah, tetapi pendidikan penguatan karakter," kata Ma'ruf Amin.

Kemarin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin kembali bertemu dengan organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan perwakilan lembaga pendidikan keagamaan. Kepada pemerintah, organisasi kemasyarakatan meminta agar kebijakan lima hari sekolah dikaji. Kamaruddin menyatakan kementerian sempat mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan agar aturan sekolah lima hari dievaluasi, kaji ulang.

Menurut Kamaruddin, jika aturan lima hari sekolah dituangkan dalam peraturan presiden, ia meminta agar madrasah dinyah atau sekolah keagamaan tak dilemahkan, dan sebaliknya justru dikuatkan. Aturan lima hari sekolah, kata dia, akan berdampak pada 6 juta santri di tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, 76.500 lembaga pendidikan keagamaan, dan sekitar 322 ribu pengajar. "Selama ini lembaga pendidikan itu terbukti berkontribusi membangun karakter bangsa. Jadi, tidak boleh dilemahkan," tutur Kamaruddin.

● ADITYA BUONMAN | MITRA TERANG

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005